

**KESENJANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR PROVINSI  
DI KAWASAN INDONESIA TIMUR**

**Fivit Baktirani**

Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Ambon  
fivitbaktirani@iainambon.ac.id

**Darwis Amin**

Ekonomi Syariah IAIN Ambon  
darwis.amin@iainambon.ac.id

**ABSTRACT**

This study aims to determine the level of economic and development inequality in provinces in Eastern Indonesia and to determine the level of income inequality between regions/provinces in Eastern Indonesia. This type of research is library research with analysis tools using the Williamson index and Klassen Typology. The type of data used in this study is secondary data which is based on GRDP data and the rate of economic growth in the provinces of Eastern Indonesia. The research results show that 1). quadrant I with a high economic growth rate followed by a high GRDP growth rate is also dominated by Papua Province, South Sulawesi Province, Central Sulawesi Province; Quadrant II, namely the low economic growth rate but the high GRDP growth rate is dominated by West Nusa Tenggara Province. In the third quadrant, where the economic growth is high but the per capita income is low, it is dominated by North Maluku Province, West Sulawesi Province and Southeast Sulawesi Province. In the fourth quadrant, which are regions with low economic growth and low per capita income, are dominated by Gorontalo Province, Maluku Province, East Nusa Tenggara Province, West Papua Province and North Sulawesi Province. 2. Income inequality in the Eastern Indonesia region from 2010 to 2021 is relatively moderate, namely an average of 0.44 which indicates that most regions have a high level of economic growth and per capita income above the provincial average in the Eastern Indonesia region.

Keyword: Gap, Income, Klassen Typology, Williamson Index.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketimpangan perekonomian maupun pembangunan pada provinsi di kawasan Indonesia Timur serta mengetahui tingkat kesenjangan pendapatan antar wilayah/provinsi di kawasan Indonesia Timur. Jenis penelitian ini adalah library research dengan alat analisis menggunakan indeks Williamson dan Tipologi Klassen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bertumpu pada data PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi yang ada di provinsi kawasan Indonesia Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). kuadran I tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti oleh laju pertumbuhan PDRB yang tinggi pula didominasi oleh Provinsi Papua, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah; kuadran II yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi rendah tetapi laju pertumbuhan PDRBnya tinggi didominasi oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di kuadran ketiga dimana pertumbuhan ekonominya tinggi tetapi pendapatan perkapitanya rendah didominasi oleh Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dikuadran keempat dimana merupakan daerah yang pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya rendah didominasi oleh Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Sulawesi Utara. 2. Ketimpangan pendapatan di kawasan Indonesia Timur sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 relatif sedang yaitu rata-rata di 0,44 yang menandakan bahwa sebagian besar daerah memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya tinggi di atas rata-rata provinsi di kawasan Indonesia Timur.

**Kata Kunci:** Kesenjangan, Pendapatan, Tipologi Klassen, Indeks Williamson.

## Pendahuluan

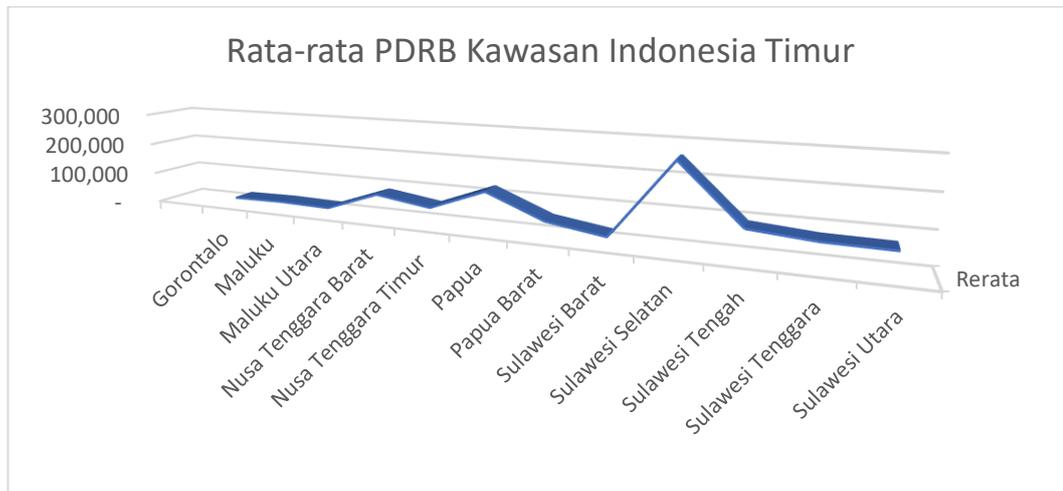
Kawasan Indonesia Timur menjadi salah satu kawasan dengan potensi ekonomi yang cukup besar di Indonesia tidak mungkin terlepas dari masalah ketimpangan perekonomian. Kawasan Timur Indonesia yang terdiri dari 12 (duabelas) propinsi ini memiliki berbagai macam persoalan penting yang harus diselesaikan, yaitu diantaranya adalah masalah kesenjangan distribusi pembangunan dan masalah pertumbuhan ekonomi. Pemerataan pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Oleh karena itu masalah pemerataan pembangunan merupakan masalah yang penting untuk diperhatikan.

Tabel 1  
PDRB Kawasan Indonesia Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Menurut Provinsi Tahun 2010 - 2020  
(Milyar Rupiah)

No	Provinsi	Tahun										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Gorontalo	15,476	16,669	17,987	19,369	20,776	22,069	23,507	25,090	26,723	28,433	28,422
2	Maluku	18,429	19,597	21,000	22,104	23,568	24,859	26,284	27,814	29,467	31,109	30,765
3	Maluku Utara	14,984	16,002	17,120	18,209	19,209	20,380	21,557	23,211	25,050	26,586	27,868
4	Nusa Tenggara Barat	70,123	67,379	66,341	69,756	73,373	89,338	94,524	94,640	90,323	94,015	93,269
5	Nusa Tenggara Timur	43,847	46,334	48,863	51,512	54,108	56,771	59,678	62,725	65,941	69,372	68,807
6	Papua	110,808	106,067	107,891	116,429	50,260	130,312	142,225	148,823	159,729	134,678	137,678
7	Papua Barat	41,362	42,867	44,423	47,706	50,260	52,346	54,711	56,903	60,454	62,071	61,592
8	Sulawesi Barat	17,184	19,028	20,787	22,229	24,196	25,964	27,525	29,347	31,177	32,874	32,082
9	Sulawesi Selatan	171,741	185,708	202,185	217,618	233,988	250,803	269,401	288,814	309,244	330,605	328,193
10	Sulawesi Tengah	51,752	56,834	62,250	68,192	71,678	82,787	91,015	97,475	103,618	111,003	134,153
11	Sulawesi Tenggara	48,401	53,547	59,785	64,274	68,292	72,993	77,746	83,002	88,329	94,078	93,447
12	Sulawesi Utara	51,721	54,911	58,678	62,423	66,361	70,425	74,765	79,485	84,259	89,028	88,126
Indonesia		655,828	684,943	727,310	779,821	756,069	899,047	962,938	1,017,329	1,074,314	1,103,852	1,124,402

Sumber: PDRB Provinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha 2010-2020.

Tabel 1 di atas menjelaskan peningkatan jumlah PDRB masing-masing propinsi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Dari 12 propinsi tersebut, pada tahun 2020 propinsi yang memiliki PDRB terendah adalah propinsi Maluku Utara, diikuti oleh propinsi Gorontalo, Maluku dan Sulawesi Barat, jika dibandingkan dengan PDRB propinsi lainnya. Perbedaan PDRB yang signifikan ini adalah terutama karena adanya perbedaan potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing propinsi.



Tabel 2  
Dampak Perubahan Rata-rata Pertumbuhan PDRB terhadap Rata-rata PDRB  
Di Provinsi Kawasan Indonesia Timur Tahun 2011-2021  
(Milyar Rupiah)

No	Provinsi	Rerata PDRB (Milyar Rp.)	Rerata Pertumbuhan PDRB (%)	Dampak $\Delta$ 1% rerata Pertumbuhan PDRB terhadap rerata PDRB (Milyar Rp.)
1	Gorontalo	22,803	5.94	3,839.68
2	Maluku	25,558	5.08	5,032.66
3	Maluku Utara	21,912	7.37	2,974.80
4	Nusa Tenggara Barat	83,212	3.06	27,224.13
5	Nusa Tenggara Timur	58,208	4.43	13,128.67
6	Papua	125,302	11.88	10,550.04
7	Papua Barat	53,000	3.67	14,452.49
8	Sulawesi Barat	26,270	6.13	4,284.53
9	Sulawesi Selatan	260,972	6.53	39,951.20
10	Sulawesi Tengah	90,051	10.23	8,802.82
11	Sulawesi Tenggara	75,098	6.60	11,386.00
12	Sulawesi Utara	72,664	5.38	13,517.75
	Indonesia Timur	76,254	5.72	13,333.17

Sumber: Data Diolah Statistik Indonesia 2010-2022

Pada tabel 2 dapat dilihat akibat dari perubahan 1% rata-rata laju pertumbuhan PDRB di sejumlah provinsi kawasan Indonesia Timur memiliki tingkat perubahan PDRB yang relatif timpang dimana terlihat bahwa provinsi yang memiliki dampak perubahan yang tinggi dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan dan sebaliknya provinsi yang memiliki dampak perubahan yang kecil sebagai akibat perubahan 1% rata-rata laju pertumbuhan PDRBnya adalah Provinsi Maluku Utara.

Dari dua belas provinsi yang ada di kawasan Indonesia Timur hanya terdapat empat provinsi (33,33%) yang memiliki dampak perubahan PDRBnya sebagai akibat perubahan 1% laju pertumbuhan PDRB masing-masing provinsi di atas rata-rata kawasan Indonesia Timur.

## Kajian Teori

### 1. Ketimpangan daerah

Ketimpangan menjelaskan jurang (gap) antara kondisi antar golongan kaya dan golongan miskin. Namun, kondisi yang sering terjadi tingkat kemiskinan turun tetapi ketimpangan yang terjadi antar golongan masyarakat makin meningkat. Ketimpangan dapat terjadi karena beberapa faktor seperti faktor alami, faktor kondisi sosial dan keputusan-keputusan strategi kebijakan. Ketimpangan awal mulanya terjadi akibat adanya tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai. Ada beberapa daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih lambat. Hal ini menyebabkan ketidakeragaman tingkat pertumbuhan tiap daerah dan adanya ketidakmerataan atau kesenjangan antar daerah.<sup>1</sup>

Ketimpangan pembangunan daerah merupakan permasalahan yang tidak merata yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan yang cukup sering terjadi. Ketidakseimbangan antara hubungan pembangunan yang menghasilkan struktur interaksi antar wilayah yang melemah.<sup>2</sup> Kondisi ini dipicu oleh beberapa hal antara lain: adanya perbedaan potensi antar daerah yang sangat besar, perbedaan situasi kondisi geografis dan jumlah ketenagakerjaan, dan perbedaan kondisi sosial budaya, serta kurang lancarnya mobilitas barang dan sarana prasarana antar daerah yang menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan pembangunan daerah. Ketimpangan pembangunan antar daerah selalu muncul dan cenderung semakin melebar.<sup>3</sup>

Teori Gunnar Myrdal menekankan proses penyebaran yang kurang merata menyebabkan ketimpangan makin melebar. Myrdal (1957) menyebutkan adanya dampak kurang menguntungkan (*backwash effects*) untuk menjelaskan fenomena meningkatnya ketimpangan antar Negara maju

---

<sup>1</sup> Arsyad, Lincoln. 1999. Ekonomi Pembangunan. Edisi 3. STIE YKPN BPFE. Yogyakarta. Hal. 33.

<sup>2</sup> Todaro, M. P. dan S. C. Smith. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid 1. Edisi Kedelapan. Erlangga. Jakarta. Hal. 23.

<sup>3</sup> Adisasmita, Rahardjo. 2012. Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal. 29.

dan Negara sedang Berkembang. Myrdal berpendapat bahwa *backward effect* lebih besar dari pada dampak penyebarannya (*spread effect*). Dampak ini menyebabkan ekspansi di pusat kegiatan ekonomi ke daerah yang relative tertinggal melalui kenaikan permintaan produk pertanian, bahan bauku, serta barang konsumsinyang dihasilkan oleh industri kecil.<sup>4</sup>

Bila ketimpangan ekonomi antar wilayah itu cukup besar, maka hal ini dapat membawa dampak negatif dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Sebagaimana diungkapkan oleh Sjafrizal, ketimpangan ekonomi antar wilayah yang besar akan menyebabkan kurang efisiennya penggunaan sumber daya yang tersedia dan mendorong terjadinya ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan (kemakmuran).<sup>5</sup>

## 2. Indeks Williamson

Kesenjangan/disparitas pendapatan antar daerah juga dapat diukur dengan menggunakan Indeks Williamson. Indeks ini dikembangkan oleh Jeffrey G. Williamson pada tahun 1965. Williamson meneliti hubungan disparitas daerah dengan tingkat pembangunan ekonomi. Dengan kata lain Indeks Williamson berbicara tentang ukuran ketimpangan pendapatan yang lebih penting lagi untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antar wilayah/daerah adalah dengan melalui perhitungan indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Secara luas, Apabila angka indeks kesenjangan Williamson semakin mendekati nol, maka menunjukkan kesenjangan yang semakin kecil dan bila angka indeks menunjukkan semakin mendekati satu maka menunjukkan kesenjangan yang semakin melebar. Dalam indeks Williamson ditetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah kesenjangan ada pada kesenjangan level rendah, sedang atau tinggi. Dari angka tersebut akan terciirikan seberapa berhasilnya

---

<sup>4</sup> Murdal, Gunnar. 1964. *The American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy*. New York: Harper & Row. p. 59.

<sup>5</sup> Sjafrizal, 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Baduose Media, Cetakan Pertama. Padang. Hal. 42.

pembangunan daerah di suatu wilayah, sehingga nantinya dievaluasi dalam perencanaan pembangunan selanjutnya. Berikut ini adalah kriterianya:

$IW < 0,35$  = Kesenjangan rendah

$0,35 \leq IW \leq 0,5$  = Kesenjangan sedang

$IW > 0,5$  = Kesenjangan tinggi

Rumus Williamson mengaitkan beberapa variabel, yakni jumlah penduduk pada suatu kota, tingkat PDRB, semuanya diasumsikan secara hierarkis. Artinya, jika yang dihitung adalah provinsi, maka perbandingannya adalah dengan nasional atau kawasan regional yang menaungi provinsi tersebut. Jika yang dihitung provinsi, maka perbandingannya adalah dengan angka nasional/regional.

Formula Indeks Williamson bisa dituliskan sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{Y}$$

Dimana :

$IW$  = Indeks Williamson.

$Y_i$  = PDRB per kapita kabupaten/kota  $i$ .

$Y$  = PDRB per kapita rata-rata propinsi.

$f_i$  = Jumlah penduduk kabupaten  $i$ .

$n$  = Jumlah penduduk di propinsi.<sup>6</sup>

### 3. Tipologi Klassen

Teknik Tipologi Klassen dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektoral daerah. Analisis ini mendasarkan pengelompokkan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) suatu daerah. Dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen, suatu sektor dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu: sektor prima, sektor potensial, sektor berkembang, dan sektor terbelakang. Penentuan

---

<sup>6</sup> Syafrizal. 2012. Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 33.

kategori suatu sektor ke dalam empat kategori di atas didasarkan pada laju pertumbuhan kontribusi sektoral dan rerata besar kontribusi sektoralnya terhadap PDRB. Kriteria yang digunakan terdiri dari empat, yaitu:

- a) Kuadran I yaitu daerah cepat maju dan bertumbuh (*high income and high growth*). Artinya daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi.
- b) Kuadran II, yaitu daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*). Artinya daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah.
- c) Kuadran III, yaitu daerah cepat berkembang (*high growth but low income*). Artinya daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah.
- d) Kuadran IV, adalah daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih rendah.<sup>7</sup>

Tabel 3

## Kuadran Tipologi Klassen

PDRB Per Kapita / Pertumbuhan Ekonomi	$Y_{ij} > Y_j$	$Y_{ij} < Y_j$
$R_{ij} > R_j$	Pertumbuhan ekonomi tinggi dan PDRB per kapita tinggi (i)	Pertumbuhan ekonomi tinggi dan PDRB per kapita rendah (iii)
$R_{ij} < R_j$	Pertumbuhan ekonomi rendah dan PDRB per kapita tinggi (ii)	Pertumbuhan ekonomi rendah dan PDRB per kapita rendah (iv)

Keterangan:

$R_{ij}$  = Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi propinsi di Indonesia Timur.

<sup>7</sup> Aswandi, H dan Kuncoro, Mudrajad. *Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris Di Kalimantan Selatan 1993-1999*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 17, No. 1. 2002. Hal. 45.

$R_j$  = Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia Timur.  
 $Y_{ij}$  = Rata-rata PDRB per kapita propinsi di Indonesia Timur.  
 $Y_j$  = Rata-rata PDRB per kapita kawasan Indonesia Timur.<sup>8</sup>

Tipologi Klassen juga merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional, yaitu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pada pengertian ini, Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan atau nasional dan membandingkan pertumbuhan PDRB per kapita daerah dengan PDRB per kapita daerah yang menjadi acuan atau PDRB perkapita secara nasional.

Tabel 4

## Matriks Strategi Pengembangan Sektor Perekonomian

Jangka Pendek (1 – 5 Tahun)	Jangka Menengah (5 – 10 Tahun)	Jangka Panjang (10 – 25 Tahun)
Sektor Prima	- Sektor berkembang menjadi sektor prima	- Sektor berkembang menjadi sektor prima
	- Sektor terbelakang menjadi sektor berkembang	

Sumber: Diolah dari Widodo.<sup>9</sup>

## Pembahasan

<sup>8</sup> Prasetyo, Bambang, Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008. Hal. 37.

<sup>9</sup> Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan. Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. UUP STIM YKPN. Yogyakarta. Hal. 40.

Berdasarkan data, kita dapat membagi provinsi di kawasan Indonesia Timur menjadi empat klasifikasi menurut Tipologi Klassen seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 8  
Klasifikasi Daerah Menurut Tipologi Klassen

No	Provinsi	Rerata PDRB (Milyar Rp.)	Rerata Pertumbuhan PDRB (%)	Klasifikasi Daerah
1	Gorontalo	22,803	5.94	Daerah Relatif Tertinggal
2	Maluku	25,558	5.08	Daerah Relatif Tertinggal
3	Maluku Utara	21,912	7.37	Daerah Berkembang Cepat
4	Nusa Tenggara Barat	83,212	3.06	Daerah Maju tapi Tertekan
5	Nusa Tenggara Timur	58,208	4.43	Daerah Relatif Tertinggal
6	Papua	125,302	11.88	Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh
7	Papua Barat	53,000	3.67	Daerah Relatif Tertinggal
8	Sulawesi Barat	26,270	6.13	Daerah Berkembang Cepat
9	Sulawesi Selatan	260,972	6.53	Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh
10	Sulawesi Tengah	90,051	10.23	Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh
11	Sulawesi Tenggara	75,098	6.60	Daerah Berkembang Cepat
12	Sulawesi Utara	72,664	5.38	Daerah Relatif Tertinggal
	Indonesia Timur	76,254	5.72	

Sumber: Data Diolah Statistik Indonesia 2010-2022

Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa provinsi yang memiliki rata-rata tingkat pendapatan dan tingkat pertumbuhan di atas nilai rata-rata pendapatan dan pertumbuhan kawasan Indonesia Timur (*high income and high growth*) yakni Provinsi Papua, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan dan sebaliknya daerah provinsi yang memiliki rata-rata tingkat pendapatan dan tingkat pertumbuhan di bawah nilai rata-rata pendapatan dan pertumbuhan kawasan Indonesia Timur (*low income and low growth*) yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Gorontalo, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil analisis ketimpangan pendapatan dengan menggunakan Indeks Williamson di Provinsi Maluku 2010-2021, dapat dilihat pada tabel 9 berikut:

Tabel 9  
Perkembangan Indeks Williamson Kawasan Indonesia Timur  
Tahun 2010-2021

Tahun	Indeks Williamson
2010	0.43
2011	1.00
2012	0.39
2013	0.40
2014	0.39
2015	0.36
2016	0.39
2017	0.39
2018	0.41
2019	0.38
2020	0.37
2021	0.38
Rerata	0.44

Sumber: Data Diolah Statistik Indonesia 2010-2022

Hasil analisis menunjukkan ketimpangan PDRB per kapita antar provinsi di kawasan Indonesia Timur dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 relatif sedang dan berfluktuatif. Trend perkembangan Indeks Williamson di kawasan Indonesia Timur dari tahun 2010 sampai dengan 2021 terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas/ketimpangan pendapatan antar provinsi di kawasan Indonesia Timur semakin membaik atau merata. Hal ini disebabkan antara lain penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di kawasan Indonesia Timur, dimana salah satu komponen desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan adalah dana perimbangan yang diberikan kepada daerah.



Dana perimbangan untuk provinsi di Indonesia setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti sehingga menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan di daerah.

Tingkat ketimpangan yang tinggi terjadi karena kegiatan perekonomian maupun pembangunan hanya berpusat di beberapa wilayah saja, seperti di kota-kota besar di kawasan Indonesia Barat sebagai ibukota, akibatnya beberapa wilayah maju pesat sedangkan yang lainnya tidak. Keseriusan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan daerah dapat dilihat dari berbagai program pemerintah daerah seperti revitalisasi tata kelola pemerintahan, optimalisasi pengelolaan SDA, penataan ruang, lingkungan hidup dan pengembangan industri pengolahan secara berkelanjutan, peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugusan pulau secara merata, peningkatan suasana kondusif, damai, harmonis, dan berbudaya yang mendukung aktivitas ekonomi, investasi dan pariwisata, peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM yang unggul. Selain itu pembangunan di beberapa wilayah yang bertumpu pada sektor unggulan (*key sector*) masing-masing daerah dan berbagai program atau kebijakan lainnya dapat menurunkan kesenjangan pembangunan ekonomi di provinsi terutama di kawasan Indonesia Timur secara signifikan.

Tabel 10  
Perkembangan Dana Perimbangan  
Indonesia Tahun 2021  
(Milyar Rupiah)

No	Tahun	Dana Perimbangan
1	2021	688,677
2	2019	747,197
3	2018	676,603
4	2017	677,080
5	2016	700,429
6	2015	516,401
7	2014	487,931
8	2013	444,798
9	2012	399,986
10	2011	334,324
11	2010	306,023

Sumber: Statistik Indonesia 2022

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian kesenjangan pembangunan ekonomi antar kawasan di Indonesia Timur diperoleh temuan studi sebagai berikut:

1. Tipologi ketimpangan wilayah di Indonesia Timur sepanjang tahun 2010-2021 yang dibagi ke dalam empat kuadran, yaitu kuadran I tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti oleh laju pertumbuhan PDRB yang tinggi pula didominasi oleh Provinsi Papua, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah; kuadran II yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi rendah tetapi laju pertumbuhan PDRBnya tinggi didominasi oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di kuadran ketiga dimana pertumbuhan ekonominya tinggi tetapi pendapatan perkapitanya rendah didominasi oleh Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dikuadran keempat dimana merupakan daerah yang pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya rendah didominasi oleh Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Sulawesi Utara.
2. Ketimpangan pendapatan di kawasan Indonesia Timur sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 relatif sedang yaitu rata-rata di 0,44 yang

menandakan bahwa sebagian besar daerah memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya tinggi di atas rata-rata provinsi di kawasan Indonesia Timur.

### **Implikasi Penelitian/Saran**

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas dapat dikemukakan beberapa saran dimana pemerintah daerah sebaiknya lebih banyak lagi mempromosikan potensi ekonominya kepada para investor.

1. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi perlu diamati secara cermat sektor ekonomi mana yang perlu dikembangkan (*key sector*) untuk memperkecil gap aktivitas perekonomian antar wilayah dengan cara mengalokasikan dana dari para investor kepada sektor unggulan guna peningkatan output pada setiap sektor ekonomi daerah.
2. Pemerintah pusat dan daerah juga bisa menunjang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Indonesia Timur dengan memberikan sarana, prasarana serta infrastruktur yang memadai dan selaras dengan potensi sumber daya alam yang ada pada masing-masing daerah.

### **Daftar Pustaka**

- Adisasmita, Rahardjo. 2012. *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 3. Yogyakarta. STIE YKPN BPFPE.
- Aswandi, H dan Kuncoro, Mudrajad. 2002. *Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris Di Kalimantan Selatan 1993-1999*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 17, No. 1.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Maluku Dalam Angka 2015*. Ambon. BPS Propinsi Maluku.
- , 2019. *Maluku Dalam Angka 2019*. Ambon. BPS Propinsi Maluku.
- Murdal, Gunnar. 1964. *The American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy*. New York: Harper & Row.

- Prasetyo, Bambang, Lina Miftahul Jannah. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sjafrizal, 2008. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Baduose Media, Cetakan Pertama. Padang.
- . 2012. Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen, C. Smith. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid 1. Edisi Kedelapan. Jakarta. Erlangga.
- Widodo, Tri. 2006. Perencanaan Pembangunan. Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). UUP STIM YKPN. Yogyakarta.